



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021**

**P A I N A N
2 0 2 2**

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Laporan ini merupakan sebagai bahan Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020.

Tujuan dari penyusunan LKPJ ini adalah untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja berbagai program dan kegiatan pada tahun 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dalam hal ini merupakan bahan dasar dari LKPJ Bupati Pesisir Selatan yang akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami menyadari apa yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 belum memenuhi harapan semua pihak, meski demikian kami akan terus bekerja keras merealisasikan program - program pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu dukungan, masukan maupun kritikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami butuhkan agar kedepannya Program dan Kegiatan yang merupakan

tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bias tepat sasaran dan berjalan baik.

Demikian LKPJ ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Painan, Januari 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



HAKDI DARMA PUTRA, SH, MSi

Nip. 19670901 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN DINAS/BADAN	11
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	11
2.2 Kebijakan Strategis	29
2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020	30
BAB III CAPAIN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	31
3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan Tingkat di Atasnya	31
3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat di Bawahnya	31
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD dan hasilnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai umpan balik (feedback) kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021, sebagai bahan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Bupati diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPj-OPD) guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya merupakan Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 141 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan Bupati tersebut mengemukakan bahwa Badan kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021. Tahun 2021 juga merupakan tahun peralihan dari Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.2 Landasan Hukum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD dan hasilnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai umpan balik (feedback) kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2020, sebagai bahan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 146 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga terwujudnya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis. Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung misi 6 yaitu “Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis”.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- I. URUSAN WAJIB
 A. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 1. URUSAN : PEMERINTAHAN UMUM
 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **1.888.902.289,00** dengan realisasi Rp. 1.845.363.221,00 dengan tingkat realisasi mencapai angka **97,70%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESBANGPOL								
1			1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah				35.267.000,00	26.639.628,-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen (%)	100 %	100 %	22.950.000,-	15.900.000,-
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang di bayarkan	bulan	2	2	22.950.000,-	15.900.000,-

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan	Persen (%)	100 %	100 %	12.317.000	10.739.628
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pengadministrasian dan pendistribusian Surat-surat masuk dan Surat-surat keluar dalam 1 tahun	Bulan	2	2	12.317.000	10.739.628
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemahaman Politik di kalangan masyarakat/aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	Persen (%)			1.443.790.819	1.441.764.281
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					1.443.790.819	1.441.764.281
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	- Jumlah Parpol terverifikasi dlm mengajukan bantuan keuangan	parpol	13 partai politik	13 partai politik	1.048.777.495	1.047.543.641

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Terealisasinya hibah bantuan keuangan partai politik					
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah pemantauan pelaporan dan perkembangan politik di daerah	laporan	4	4	395.013.324	394.220.640
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				855.000	848.100
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				855.000	848.100

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya data monev yang mendapat pembinaan	laporan	1	1	855.000	848.100
				Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					73.462.004	72.448.202
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					73.462.004	72.448.202
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	- Jml pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional, hari besar nasional dan hari besar lainnya	kali	23	22	73.462.004	72.448.202
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				141.537.628	119.742.040
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				141.537.628	119.742.040

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika tingkat nagari dan kecamatan - Sosialisasi Penawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat - Terealisasinya hibah bantuan Penanganan Narkotika ke Polres Pessel	Nagari Kali Paket	72 4 1	- 4 1	118.318.264	96.632.422
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah	laporan	4	4	23.219.364	23.109.618
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial						

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tidak Kriminal - Jml rapat – rapat Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) - Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah (TKDPD) - Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Tim Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) - Jumlah rapat-rapat koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing	Kali Kali Kali Kali Kali	15 4 - - 1	15 4 - - 1	149.607.534	144.695.570

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
					- Jumlah rapat – rapat koordinasi Tim terpadu penanganan konflik social - Jumlah rekomendasi penelitian yang diterbitkan	rekomen dasi	50	143		
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Laporan	4	4	44.382.304	39.225.400

- **Sasaran Strategis PK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional, hari besar nasional dan hari besar lainnya	22 kali 1 kali	22 kali 1 kali	100 % 100 %

			- Terfasilitasinya Temu ramah antara veteran dengan pemerintah daerah			
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat - Terealisasinya Hibah Bantuan Penanganan Narkoba ke Polres Pesisir Selatan - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, Budaya, dan fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Daerah 	4 kali	4 kali	100 %
				1 paket	1 paket	100 %
				4 laporan	4 laporan	100%
3	Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah parpol terverifikasi dalam mengajukan bantuan keuangan - Terealisasinya Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik - Jumlah pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah 	13 parpol	13 parpol	100 %
				13 paket	13 Paket	100 %
				1 laporan	1 laporan	100 %
4	Meningkatnya peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya data monev ormas yang mendapat pembinaan	1 laporan	1 laporan	100 %
5	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal - Jumlah Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) - Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing 	15 kali	15 kali	100 %
				4 kali	4 kali	100 %
				1 kali	1 kali	100 %

			<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya Rekomendasi untuk penelitian - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 	<p>50 rekomendasi</p> <p>4 laporan</p>	<p>143 rekomendasi</p> <p>4 laporan</p>	<p>286 %</p> <p>100 %</p>
--	--	--	---	--	---	---------------------------

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
 1. Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan indicator :
 - Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional, hari besar nasional dan hari besar lainnya
Target kinerja (22 kali), realisasi (22 kali)
Kegiatan ini meliputi upacara peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
 2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indicator :
 - a. Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan target kinerja 4 kali dengan realisasi 4 kali (100 %). Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Bayang, Linggo Sari Banganti, Lunang dan Silaut.

- b. Terealisasinya Hibah Bantuan Penanganan Narkoba ke Polres Pesisir Selatan dengan target 1 paket
- c. Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, Budaya, dan fasilitasi pencegahan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Daerah dengan target 4 dokumen laporan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- 3. Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indicator :
 - a. Jumlah parpol terverifikasi dalam mengajukan bantuan keuangan, dengan target 13 Partai Politik (100%)

- b. Terealisasinya Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik dengan target 13 paket bantuan (100%)
- c. Jumlah pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah dengan target 1 laporan (100%)

Pencapaian target dari indicator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Meningkatnya peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dengan indicator :
 - a. Tersedianya data monev ormas yang mendapat pembinaan target 1 laporan (100%) Pencapaian target dari indicator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social, dengan indicator :
 - a. Jumlah Koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, dengan target 15 kali, realisasi 15 kali (100%)
 - b. Jumlah Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan target 4 kali realisasi 4 Kali (100 %)
 - c. Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing dengan target 1 kali , realisasi 1 kali (100%)

- d. Terbitnya Rekomendasi untuk penelitian, dengan target 50 rekomendasi, realisasi 143 rekomendasi (286%)
- e. Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target 4 laporan, realisasi 4 laporan (100%).

NB :

- 1. Permasalahan : 1. –
- 2. Solusi : 1. –
- 3. Tindak Lanjut : tidak ada Rekomendasi

DRPD

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2021 mempunyai 6 Program, 12 Kegiatan dan 26 sub kegiatan. Capaian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat di lihat sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini berada pada Sekretariat yang merupakan kegiatan rutin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota ini hanya dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2021 setelah peralihan dari Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik pada Sekretariat

Daerah menjadi OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 35.267.000,- realisasi sebesar Rp. 26.639.628 dengan capaian sebesar 75.53 % yang terdiri dari :

A.1 Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 35.267.000 dengan realisasi sebesar Rp. 26.639.628,- dengan capaian sebesar 75.53 %

A.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 22.950.000, realisasi sebesar Rp. 15.900.000,- dengan capaian sebesar Rp. 69.28 %.

A.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 12.317.000,- realisasi sebesar Rp. 10.739.628 dengan capaian sebesar 87.19 %

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan, Sosial Budaya dan Agama. Program ini sebesar Rp. 73.462.004, realisasi sebesar Rp. 72.448.202 dengan capaian 98.62 % mempunyai 1 kegiatan yaitu :

B.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp. 73.462.004,realisasi sebesar Rp. 72.448.202 dengan capaian 98.62 % terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

B.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan,

Bhineka Tungga Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp. 73.462.004, realisasi sebesar Rp. 72.448.202 dengan capaian 98.62 %.

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas sebesar Rp. 1.443.790.819 terealisasi sebesar Rp. 1.441.764.281 capaian sebesar Rp. 99.86 % mempunyai 1 Kegiatan yaitu :

C.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 1.443.790.819 realisasi sebesar Rp. 1.441.764.281 dengan capaian (99.86%) yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

C.1.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.048.777.495 realisasi sebesar Rp. 1.047.543.641 dengan capaian (99.88 %).

C.1.2 Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 395.013.324 realisasi sebesar Rp. 394.220.640,- dengan capaian 99.8 %.

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini dengan anggaran sebesar Rp. 855.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 848.100,- (99.19 %) mempunyai 1 kegiatan yaitu :

D.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 855.000,- dan realisasi sebesar Rp. 848.100,- dengan capaian 99.19 %. Kegiatan ini mempunyai 1 Sub Kegiatan yaitu :

D.1.1 Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah, dengan jumlah anggaran Rp. 855.000,- realisasi sebesar Rp. 848.100,- dengan capaian 99.19 %.

E Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 141.537.628, realisasi sebesar Rp. 119.742.040 dengan capaian 84.60 %. Program ini mempunyai I kegiatan yaitu :

E.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 141.537.628, realisasi sebesar Rp. 119.742.040 dengan capaian 84.60 %, dengan dua sub kegiatan yaitu :

E.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 118.318.264, realisasi Rp. 96.632.422 dengan capaian 81.67%..

E.1.2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, social budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 23.219.364, realisasi sebesar Rp. 23.109.618 dengan capaian 99.53%.

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 193.989.838, realisasi sebesar Rp. 183.920.970 dengan capaian 94.81%. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu:

F.1 Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 193.989.838, realisasi sebesar Rp. 183.920.970 dengan capaian 94.81%. Kegiatan ini mempunyai dua sub kegiatan yaitu :

F.1.1 Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan anggaran Rp. 149.607.534, realisasi sebesar Rp. 144.695.570 dengan capaian 96.72 %.

F.1.2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik dengan anggaran Rp. 44.382.304 dan realisasi sebesar Rp. 39.225.400 dengan capaian 88.38 %.

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek
3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.

4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
5. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya.
6. Meningkatnya kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat
7. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
8. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan.
9. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur.

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir atas LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 tidak ada.

BAB III

CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- 3.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya

NIHIL

- 3.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat di Bawahnya

NIHIL

BAB. IV
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka memberikan keterangan yang akuntabilitas dan memberikan gambaran kinerja badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember 2021 total anggaran belanja Rp. 1.888.902.289 dengan realisasi Rp. 1.845.363.221 atau 97.70 %.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan peralihan dari Bagian di Sekretariat Daerah. Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 berjalan baik walau, dengan rata rata pencapaian indicator 99,96 %.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.